

WARTA BKP

BADAN KETAHANAN PANGAN



KEPALA BKP KEMENTAN : Indonesia sebagai Solusi Masalah Pangan Dunia



Kepala BKP Kementan:
Indonesia sebagai
Solusi Masalah
Pangan Dunia

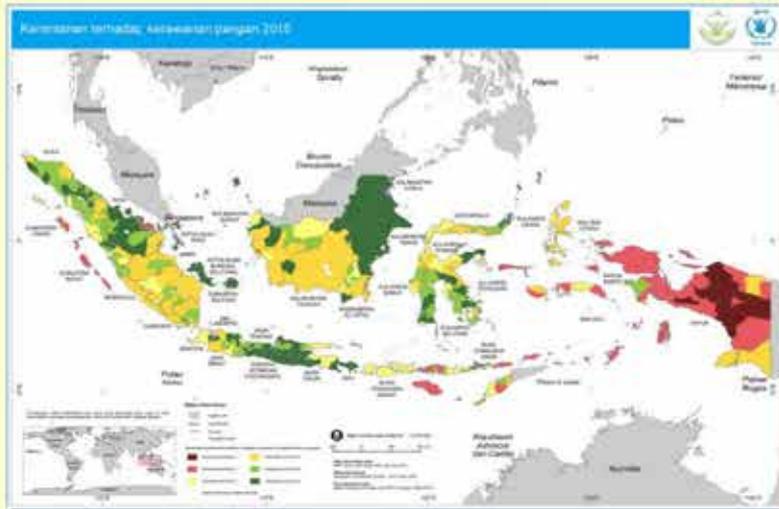


KRPL Kementan,
Berkontribusi Atasi
Kemiskinan dan
Kerawanan Pangan



Kementan Lindungi
Konsumen melalui
Jaminan Keamanan
dan Mutu Pangan Segar

335 KABUPATEN TAHAN PANGAN SELAMA PERIODE 2015-2018



KAB. RENTAN PANGAN



KAB. TAHAN PANGAN



- Kabupaten Rentan Pangan yang Naik Peringkat Sebanyak 75 Kabupaten (19%)
- Kabupaten Tahan Pangan yang Naik Peringkat Sebanyak 102 Kabupaten (26%)

#capaianKINERJA4TAHUNBKP



BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



BKPKEMANTAN



@BKPKemantan



badanketahananpangan



BKP Kementan

SAMBUTAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN



Waktu terus berlalu. Tanpa terasa, tinggal beberapa bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2018 dan berganti memasuki tahun 2019. Berbagai kegiatan baik di Jakarta maupun di daerah telah dilaksanakan dengan baik, sehingga mampu mengangkat gengsi dan kiprah

Badan Ketahanan Pangan sebagai institusi yang disegani dalam urusan ketahanan pangan. Melalui berbagai potensi yang dimiliki, terutama kekayaan sumberdaya alamnya, Indonesia mampu berkontribusi dalam pemenuhan pangan tidak hanya secara nasional, tetapi juga internasional, sebagaimana mimpi yang harus diwujudkan Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045 mendatang.

Dalam konteks ini, Badan Ketahanan Pangan telah berkontribusi nyata melalui berbagai program seperti Kawasan Rumah Pangan Lestari, Kawasan Mandiri Pangan, Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), Pengembangan Lumbung Pangan dan juga membangun kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Apa saja yang sudah dan terus kita lakukan sebagian dipaparkan dalam penerbitan ini. Begitu juga dengan semangat petani muda Korea yang melakukan penajangan untuk membangun kerjasama korporasi petani. Tahun-tahun mendatang, kita masih akan bersingungan dengan pemantauan ketersediaan dan stabilitasi harga pangan yang harus terjaga dan pengeneragaman pangan yang harus terus disosialisasikan dan diaplikasikan melalui berbagai inovasi.

Menyadari tantangan dan peluang dalam pembangunan ketahanan pangan kedepan, saya mengajak semua pihak baik di pusat maupun dinas ketahanan pangan di daerah bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih smart melalui koordinasi dan sinergitas dengan lembaga lainnya.

Untuk itu, mari terus kita bangun semangat dan motivasi yang lebih kokoh lagi, demi terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Sekretariat Redaksi :

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha, Bagian Umum,
Badan Ketahanan Pangan
Gedung E lantai 4 ruang 420
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan
Pasar Minggu Jakarta 12550

Telp. (021) 7805035
Fax. (021) 78846536
Email : bkphumas.kemtan@gmail.com
Website : bkp.pertanian.go.id

DAFTAR ISI

EDISI 5 2018

Kepala BKP Kementan: Indonesia sebagai Solusi Masalah Pangan Dunia	4
Peran BKP Kementan Dalam Penanganan Kerawanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan	6
Kementan dukung Pencapaian Zero Hunger melalui KRPL	7
Kementerian Pertanian Berkomitmen Dukung Program Penurunan Stunting	8
Indonesia Ajak Komunitas Dunia Atasi Kelaparan	9
KRPL Kementan, Berkontribusi Atasi Kemiskinan dan Kerawanan Pangan	10
Kepala BKP Kementan: Kembangkan Pangan Lokal secara Komersil	11
Pemanfaatan Pekarangan Berikan Berkah Bagi Penduduk Ijen	12
Era Baru Pengembangan Industri Pangan Dan Produk Pangan (Food and Product Food/ FPF)	13
Kementan Lindungi Konsumen melalui Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	14
Kementan Sertifikasi 22 Rumah Kemas untuk dukung Ekspor	15
BKP Kementan Dorong Ekspor Pala Melalui Penerbitan Health Certificate (HC)	16
Kementan Bangun Kawasan Mandiri Pangan Untuk Tingkatkan Pendapatan Masyarakat	17
Kawasan Mandiri Pangan Kementan dapat Meningkatkan Pendapatan dan Entaskan Kemiskinan	19
Kepala BKP Kementan Terima Petani Muda Korea, untuk Jajaki Korporasi Petani	20
BKP Kementan Terbitkan FSVA untuk Rekomendasi Atasi Kerawanan Pangan	21
e-commerce TTI: Menjawab Tantangan Era Digital Distribusi Pangan	23
Produksi Pertanian Setiap Tahun Meningkat	25
BKP Kementan Tingkatkan Kompetensi SDM untuk Dukung Ekspor	26



Kepala BKP Kementan: **Indonesia sebagai Solusi Masalah Pangan Dunia**

“ Sebagai negara keempat terpadat di dunia, ketergantungan pada impor pangan akan menempatkan Indonesia dalam situasi yang sangat rentan. Oleh karena itu, swasembada pangan adalah suatu keharusan dalam pembangunan pertanian. ”

Indonesia menghadapi tantangan pembangunan pertanian akibat penyusutan luas lahan karena pertumbuhan penduduk yang relatif cepat, peningkatan permintaan makanan dalam hal kualitas maupun kuantitas, konversi lahan dan fragmentasi, perubahan iklim dan kondisi cuaca ekstrem, serta petani yang sudah tua bekerja di sektor pertanian tanaman pangan tidak memiliki insentif sosio-ekonomi.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian



Pertanian, Agung Hendriadi dalam International Workshop on Tropical Wetlands di Banjarmasin, Jumat (19/10).

"Sebagai negara keempat terpadat di dunia, ketergantungan pada impor pangan akan menempatkan Indonesia dalam situasi yang sangat rentan. Oleh karena itu, swasembada pangan adalah suatu keharusan dalam pembangunan pertanian," ujar Agung.

"Indonesia tidak akan berhenti pada upaya pemenuhan pangan di dalam negeri saja, tetapi bertujuan mencapai surplus dalam produksi sehingga dapat menjadi bagian dari solusi kekurangan pangan dunia," jelas Agung lagi.

Saat ini menurut Agung, Indonesia telah mencapai swasembada beras, bawang merah, cabai dan jagung.

"Kami juga menargetkan surplus komoditas pangan strategis lainnya, sehingga pada tahun 2045, satu abad setelah kemerdekaan negara, kita bisa menjadi Lumbung Pangan Dunia," tegas Agung yang diberi aplaus hadirin.

Pada bagian lain, Agung menjelaskan upaya pemanfaatan lahan rawa.

"Untuk memperluas area pertanian di lahan rawa dan mengintensifkan sistem pertanian di daerah pertanian yang ada. Kami memahami bahwa rawa bukanlah sumber daya lahan yang ideal

untuk pertanian karena peran lingkungannya yang penting dan kesuburannya yang rendah," jelas Agung.

Namun demikian lanjut Agung, karena kelangkaan lahan yang sesuai, lahan rawa dapat dikelola secara menguntungkan dan berkelanjutan," urai Agung.

Workshop yang digelar Badan Litbang Pertanian ini dihadiri sekitar 100 peserta dari para akademisi berbagai perguruan tinggi, nara sumber beberapa negara, para peneliti dan lainnya.

Peserta juga direncanakan akan melihat optimalisasi pemanfaatan lahan rawa di desa Jejangkit Muara, kabupaten Baritokuala Kalsel.

Peran BKP Kementan Dalam Penanganan Kerawanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tangga miskin pada Maret 2018 sebesar 15.81 juta jiwa. Jika dibandingkan periode yang sama, yaitu Maret 2013 yang mencapai 17.74 juta jiwa, telah terjadi penurunan sebesar 10.88 %. Adanya penurunan jumlah KK miskin, menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Keluarga miskin sangat rentan terhadap kerawanan pangan, karena pengeluaran terbesar untuk mencukupi kebutuhan pangan. Karena itu mereka harus dibantu,” ujar Kepala BKP Agung Hendriadi, menjelaskan diruang kerjanya, Senin (29/10).

Menurut Agung, berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) pada tahun 2018 terdapat 81 kabupaten rentan rawan pangan. Daerah rentan rawan pangan ini ditandai dengan tingginya rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan, tingginya balita stunting dan tingginya persentase penduduk miskin.

Untuk menangani daerah rentan rawan pangan dan pengentasan kemiskinan, menurut Agung, pihaknya telah berkontribusi nyata melalui berbagai kegiatan pada daerah-daerah yang masuk dalam kategori rentan rawan pangan.

“Untuk menangani daerah rentan rawan pangan sekaligus pengentasan kemiskinan, kami melakukannya melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Kawasan Mandiri Pangan (KMP),” tutur Agung.

Tujuan KRPL menurut Agung untuk



memenuhi gizi keluarga dan meningkatkan pendapatan.

“Melalui kegiatan ini masyarakat melalui KWT diajak untuk budidaya sumber karbohidrat, protein dan vitamin dengan memanfaatkan lahan pekarangan,” jelas Agung.

“Melalui KRPL, masyarakat selain dapat memenuhi kebutuhan pangannya, juga meningkatkan pendapatan yang secara tidak langsung juga akan memperbaiki kesehatannya,” tambah Agung.

Menurut Agung, melalui KRPL para ibu rumah tangga yang masuk dalam kwt bisa mengurangi pengeluaran belanja bahan pangan antara 750 hingga 1.5 juta per bulan.

Sedangkan kegiatan KMP yang dilakukan sejak 2015 bertujuan mendorong ketersediaan pangan dipedesaan, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam melakukan usaha, penguatan kelembagaan ekonomi, dan integrasi dukungan lintas sektor.

Dijelaskan Agung, pada tahun 2015 – 2017 Kegiatan KMP dilaksanakan di 23 provinsi, 76 kabupaten, 77 kawasan/kecamatan, 388 desa, 388 kelompok.

Tahun 2018 ditambah di 20 kabupaten, 20 kawasan/desa, 40 kelompok.

“Untuk 2018 ini KMP dialokasikan di 17 provinsi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui padat karya serta penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan,” lanjut Agung.

Menurut Agung, KRPL dan KMP telah berkontribusi terhadap penurunan kerentanan pangan wilayah. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan FSVA.

“Berdasarkan Peta FSVA 2018, terjadi peningkatan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten (44 persen) jika dibandingkan dengan FSVA 2015,” kata Agung.

Sedangkan dari segi jumlah, telah terjadi pengurangan jumlah daerah rentan rawan pangan sebanyak 41 kabupaten dan peningkatan kabupaten tahan pangan di 47 kabupaten.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kedua kegiatan yang dilakukan BKP menyentuh langsung masyarakat yang rentan rawan pangan dan miskin. Bahkan untuk KRPL, lokasi kegiatannya bersentuhan langsung pada daerah-daerah stunting.



Kementan dukung Pencapaian Zero Hunger melalui KRPL

Sesuai dengan komitmen global dalam Sustainable Development Goals bahwa semua negara PBB harus mewujudkan tercapainya zero hunger, yaitu upaya memerangi kelaparan.

Untuk mewujudkan hal tersebut harus diupayakan kemudahan akses pangan yang beragam bagi semua anggota keluarga.

Untuk mendukung komitmen tersebut, Kementerian Pertanian terus menggali potensi untuk memudahkan akses penyediaan pangan yang beragam bagi keluarga. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan potensi lahan pekarangan.

"Kita mempunyai lahan pekarangan mencapai 10,3 juta hektar, yang terus kita garap sebagai penyedia pangan keluarga yang potensial," urai Kepala

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, yang ditemui dikantornya beberapa waktu lalu.

"Jika lahan pekarangan ini dikembangkan dengan aneka tanaman, akan dapat memudahkan akses bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan," tambah Agung.

Melihat keterkaitan antara potensi pekarangan terhadap penurunan zero hunger, Kementerian Pertanian telah mengembangkan program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan berbasis sumber daya lokal.

"Kita sudah kembangkan sejak tahun 2015 di 8.800 kelompok di seluruh Indonesia dan akan terus kita akselerasi," urai Agung

Kegiatan yang dilakukan menurut Agung, meliputi pengembangan Kebun

Bibit Desa (KBD) demplot dan pengembangan pekarangan anggota. Melihat manfaat yang cukup penting, kegiatan ini telah direplikasi di beberapa daerah melalui dana APBD.

Terkait hal tersebut, Agung juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan hasil pekarangan untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga.

"Kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan ini dapat menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk mendukung kegiatan pencapaian Zero Hunger," lanjut Agung

Target pencapaian zero hunger sampai tahun 2030. Untuk itu, program ini harus bisa berkelanjutan dan lestari.

"Kita siapkan Kebun Bibit Desa (KBD) yang dibangun untuk mencukupi kebutuhan anggota dan masyarakat sekitarnya," jelas Agung.

Kementerian Pertanian Berkomitmen Dukung Program Penurunan Stunting

"Kementerian Pertanian berkomitmen dan mendukung upaya pemerintah dalam penurunan stunting, utamanya dalam penyediaan pangan yang cukup dan beragam bagi masyarakat," demikian dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi dalam paparannya sebagai salah satu keynote speaker pertemuan Sosialisasi Germas dan Pemantauan Terpadu RAD-PG Tahun 2018 Regional Timur Tengah yang diselenggarakan Bappenas, Jum'at (21/9) di Sanur Bali.

Lebih lanjut disampaikan Agung bahwa, upaya-upaya lain yang telah dilakukan Kementerian Pertanian adalah mendekatkan akses masyarakat terhadap pangan, penyediaan infrastruktur produksi pangan, menjaga stabilisasi pasokan dan harga serta mendeteksi dini daerah rentan rawan pangan dan stunting.

"Data menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat Indonesia masih rendah terhadap protein hewani dan sayuran. Untuk itu Badan Ketahanan Pangan telah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dalam menyediakan pangan dan gizi bagi keluarganya dengan memanfaatkan lahan pekarangan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)," jelas Agung.

Sejak tahun 2010 hingga kini, BKP telah mengembangkan KRPL di 18.000 desa, pada hampir 500 kabupaten dan 34 provinsi.

Pada tahun 2018 ini dikembang-



kan lagi 2300 KRPL, 1000 diantaranya dilaksanakan di desa stunting, dan tahun 2019 direncanakan akan dilaksanakan di 1600 desa stunting pada 160 kabupaten 34 provinsi.

Pada bagian lain Agung juga mengingatkan, seperti halnya beberapa negara lain di Asia Pasifik, Indonesia saat ini sedang menghadapi triple burden

of malnutrition (tiga permasalahan gizi) yaitu balita pendek (stunting), balita kurus (wasting) dan gizi lebih/kegemukan (obesitas).

"Masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh salah satu Kementerian saja, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama kementerian terkait," pungkas Agung.

Indonesia Ajak Komunitas Dunia Atasi Kelaparan

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian ikut berperan serta dalam Pertemuan Committee on World Food Security (CFS) ke-45 dari 15 – 19 Oktober 2018.

CFS merupakan forum internasional yang bekerja untuk pencapaian ketahanan pangan dan nutrisi yang inklusif dengan pendekatan multi-stakeholder yang mendapat dukungan politik pemangku kepentingan dalam membangun konsensus untuk pengambilan kebijakan.

Pertemuan tahunan CFS merupakan badan pusat untuk koordinasi dan pengambilan keputusan serta berbagi pengalaman terkait ketahanan pangan bagi stakeholder pada tingkat global.

Pada sesi State of Food Security and Nutrition in the World (2018), dinyatakan bahwa telah terjadi peningkatan kelaparan di dunia.

Jumlah *undernourished people* (orang yang tidak memiliki cukup energi untuk hidup sehari-hari) meningkat dari semula sekitar 804 juta pada tahun 2016 menjadi hampir 821 juta orang tahun 2017; dengan kata lain, 1 dari 9 orang di dunia termasuk ke dalam *undernourished people*.

Kondisi ini disebabkan ketidakstabilan kondisi akibat konflik, perubahan iklim, dan penurunan ekonomi yang mempengaruhi berbagai negara-negara dan memperburuk ketahanan pangan di dunia; khususnya di Amerika Selatan dan sebagian besar Afrika.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris BKP, Mulyadi Hendiawan, sebagai Delegasi RI menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya kelaparan di dunia



dan mengajak komunitas internasional dan anggota CFS mengatasi kelaparan di dunia.

“Dalam mengatasi multiple burden problem yaitu kekurangan dan kelebihan konsumsi energi, serta kekurangan gizi mikro/hidden hunger), Pemerintah Indonesia membangun pangan dan gizi melalui pendekatan baik gizi spesifik (terkait sektor kesehatan) maupun gizi sensitif (non-kesehatan),” kata Mulyadi.

Hal ini dilakukan, tambah Mulyadi, karena pendekatan non kesehatan berkontribusi 70% pada pencegahan masalah malnutrisi.

Dalam pembangunan pangan dan gizi, pemerintah juga mengeluarkan

payung hukum berupa Peraturan Presiden no. 83/Tahun 2017 Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi; dan Peluncuran Strategi Nasional untuk Mempercepat Pencegahan Stunting 2017-2021 yang diluncurkan Wakil Presiden RI Agustus 2017 lalu.

Pada tahap awal akan dilaksanakan di 100 kabupaten prioritas yang mencakup 22,000 desa dan 3,1 juta anak-anak stunting.

CFS menyampaikan kembali komitmennya untuk mengintensifkan promosi penggunaan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan CFS oleh negara-negara, guna mendukung koherensi kebijakan ketahanan pangan dan gizi.



KRPL Kementan, Berkontribusi Atasi Kemiskinan dan Kerawanan Pangan

Potensi lahan pekarangan Indonesia diperkirakan capai 10,3 juta hektar. Jika dikembangkan untuk aneka tanaman untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, akan berkontribusi dalam penanganan kerawanan serta kemiskinan.

Melihat potensi tersebut, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian sejak tahun 2010 telah mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Dari tahun 2015 hingga kini telah tersebar

di 8.814 kelompok di 34 provinsi.

Dalam keterangannya, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi mengajak masyarakat mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam aneka tanaman, baik sayuran maupun buah-buahan.

"Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) ini adalah solusi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,"

Agung.

Menurut Agung, KRPL juga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, karena sebagian hasil panen dari pekarangan bisa dijual.

"Dengan demikian, KRPL yang kami kembangkan juga berkontribusi dalam penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan," jelas Agung yang ditemui dikantornya beberapa waktu lalu.

KRPL adalah salah satu gerakan Diversifikasi pangan melalui Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan berbasis sumber daya lokal melalui pengembangan Kebun Bibit Desa, demplot dan pengembangan pekarangan anggota.

"Melalui KRPL yang dikembangkan, konsumsi pangan masyarakat, baik sumber protein serta sumber vitamin mineral yang diperoleh dari sayur dan buah dapat meningkat, sehingga konsumsi pangan masyarakat lebih beragam, bergizi seimbang dan aman. Tidak

terlaku banyak porsi karbohidrat (beras)," tambah Agung.

Nilai tambah dalam pengembangan KRPL adalah, relatif mudah dalam penganannya. Misalnya di saat musim kemarau dimana kesulitan air, tanaman di pekarangan bisa dipenuhi dari air yang ada dirumah.

Agar KRPL bisa berkelanjutan, diharapkan Kebun Bibit Desa (KBD) yang dibangun benar-benar dikembangkan untuk mencukupi kebutuhan anggota, sehingga usaha bisa berkelanjutan.

"Saya sudah meminta kepada setiap daerah, agar kelompok menggalakkan pembibitan di KBD dan membagikannya kepada anggota, sehingga KRPL ini bisa lestari," pesan Agung

Berdasarkan kajian ekonomi yang dilakukan BKP, kegiatan KRPL sangat membantu ekonomi rumah tangga dalam menghemat pengeluaran Rp 750 ribu hingga Rp 1,2 juta/rumah tangga dalam sebulannya.



Kepala BKP Kementan:

Kembangkan Pangan Lokal secara Komersil

"Mulai tahun depan, saya usulkan agar nilai komersil pangan lokal yang dilombakan menjadi kriteria utama untuk menentukan pemenangnya," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi, saat memberikan sambutan Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Berimbang dan Aman Berbasis Sumberdaya Lokal, di halaman perkantoran pemerintah provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu (17/10).

Menurut Agung, nilai komersil tersebut sangat beralasan, agar pengolahan menu makanan dari bahan pangan lokal tidak berhenti sampai dilomba.

"Lomba ini bagus untuk menumbuhkan kreatifitas dan inovasi dalam membuat menu yang menarik citarasa dan bernilai gizi, tetapi nilai komersilnya juga perlu diperhatikan dan harus dikembangkan, sehingga ada nilai ekonomi yang diperoleh," kata Agung.

"Kalau sudah ada nilai ekonominya, nanti akan berkembang usaha-usaha kecil dan menengah (UKM) yang mengembangkan bisnis pangan lokal, dan pada akhirnya gengsi pangan lokal akan naik, karena banyak yang mencari," tambah Agung.

Lomba cipta menu merupakan salah satu rangkaian acara tahunan yang digelar Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS), dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Menurut Kepala Pusat Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tri Agustin, kegiatan yang diikuti 34 provinsi ini sangat menarik karena mampu mengali potensi pangan lokal yang ada dan bisa dikembangkan di daerah.

"Melalui lomba ini, masyarakat akan mengetahui bahwa semua daerah

memiliki pangan lokal yang jika dikembangkan terus, akan memperkaya ketersediaan pangan, sehingga sangat mendukung pengankaragaman pangan?" ujar Tri Agustin.

Kriteria lomba yang dinilai mencakup: keseimbangan gizi pangan, keankaragaman bahan pangan lokal yang digunakan, kreatifitas pengembangan menu, citarasa, penampilan dan keamanan pangan.

Setelah dewan juru yang terdiri dari perwakilan dari akademisi, pesohor boga, TP PKK Pusat, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan media massa, melakukan penilaian, maka diputuskan pemenang juara 1, 2, 3 masing-masing dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sedangkan juara Harapan 1, 2 dan 3 adalah peserta dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta dan Aceh

Para penerima penghargaan selain mendapat Piala, juga memperoleh sertifikat dan dana pembinaan.



Pemanfaatan Pekarangan Berikan Berkah Bagi Penduduk Ijen

Adalah Desa Taman Sari yang berada pada ketinggian 2500 mdpl di kawasan Gunung Ijen tepatnya di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu pusat pemukiman penduduk yang terbentuk karena adanya aktifitas PT. Perkebunan Nasional (PT-PN) Lorolas.

Didukung dengan iklim yang sejuk, Desa Taman Sari atau yang lebih dikenal dengan Kampung Baru, kini telah menjelma menjadi "Kawasan Pangan Lestari".

Berada sekitar 40 km dari pemukiman lain dan menembus kawasan hutan Gunung Ijen, membuat warga kesulitan mendapatkan bahan pangan sayuran. Namun kini warga sudah tidak lagi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sayuran dengan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan.

Melalui kegiatan ini semua warga

khususnya ibu-ibu memanfaatkan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga.

Dalam kunjungannya di kampung baru, Desa Tamansari, Bondowoso, Kepala BKP Agung Hendriadi pada Kamis (1/10) menyampaikan bahwa "Kegiatan ini dapat menjadi inspirasi untuk pengembangan di PTPN dan lingkungan perkebunan swasta lainnya, serta pengembangan kegiatan KRPL juga memberikan manfaat ekonomi" ujar Agung.

Selain itu menurut Agung, kawasan tersebut dapat sekaligus ditata sehingga menjadi salah satu obyek wisata agro untuk menarik wisatawan Ijen.

Sementara itu salah satu penggerak kelompok Ibu Heri mengungkapkan rasa syukurnya dengan adanya kegiatan pemanfaatan pekarangan ini.

"Alhamdulillah, kalau dulu sulit dapat sayur, sekarang tinggal berkahnnya, masyarakat di kampung ini sudah ti-

dak lagi beli sayuran" ungkap nya.

Ibu Heri menceritakan bahwa semua rumah tangga di kampung nya bisa mencukupi kebutuhan sayur nya dari pekarangan. Bukan hanya itu, penjual sayur pun ada yang datang setiap minggu untuk membeli sayur dari pekarangan di wilayah nya.

Dia pun mengakui bahwa dari pekarangan seluas 30 m2, setiap rumah tangga dapat menghemat minimal Rp 10.000 per hari, dan ini artinya menambah pendapatan rumah tangga sekitar Rp 300.000 per bulan.

Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tri Agustin Satriani yang turut mendampingi Kepala BKP mengungkapkan harapannya kepada kelompok agar meningkatkan kegiatan ekonominya dengan mengembangkan pangan olahan khas yang dikemas menarik sebagai jajanan dan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Ijen.

Era Baru Pengembangan Industri Pangan Dan Produk Pangan (*Food and Product Food/ FPF*)

Pangan dan produk pangan mempunyai sumbangan cukup besar pada perekonomian nasional, berpengaruh terhadap inflasi. Industri pangan dan minuman (mamin) menjadi penyumbang ke 2 terbesar Pendapatan Domestik Bruto non migas. Industri ini menyumbang 6,14 Persen PDB non migas pada tahun 2017 dengan pertumbuhan 8,3 persen. Oleh karena itu pengembangan industri mamin harus dijadikan prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan.

Industri pangan dan produk pangan khususnya yang berbasis tepung-tepungan saat ini masih banyak menggunakan bahan baku impor, misalnya terigu. Tahun 2018 impor gandum dan terigu diperkirakan lebih dari 11 juta ton atau meningkat rata-rata 12,2%/tahun.

Disisi lain Indonesia mempunyai potensi besar menghasilkan tepung singkong, jagung dan pati sagu. Produk tepung lokal tersebut dapat dijadikan bahan baku industri FPF. Untuk itu Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi pada seminar dan workshop Internasional Plant Industry mengajak semua pihak melokalkan bahan baku industri FPF di Universitas Jember, Kamis (1/11).

"Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya perubahan kebiasaan (habit movement) baik di sisi hulu, usaha tani, maupun sektor paling hilir, yaitu meningkatkan konsumsi produk pangan yang berbahan baku lokal," ujar Agung.



Perubahan usaha tani ini menurut Agung, dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

"Produktivitas singkong misalnya, harus mampu mencapai 50 ton/ha. Dengan produktivitas diatas 50 ton, petani dapat menjual singkongnya sekitar Rp 1200 dan sudah mendapatkan untung besar," jelas Agung.

Masih menurut Agung, dengan harga singkong kurang dari Rp 1200/ kg, akan dihasilkan tepung mocaf dengan harga sekitar Rp 5.000/kg. Harga tersebut bisa bersaing atau minimal sama dengan terigu untuk industri.

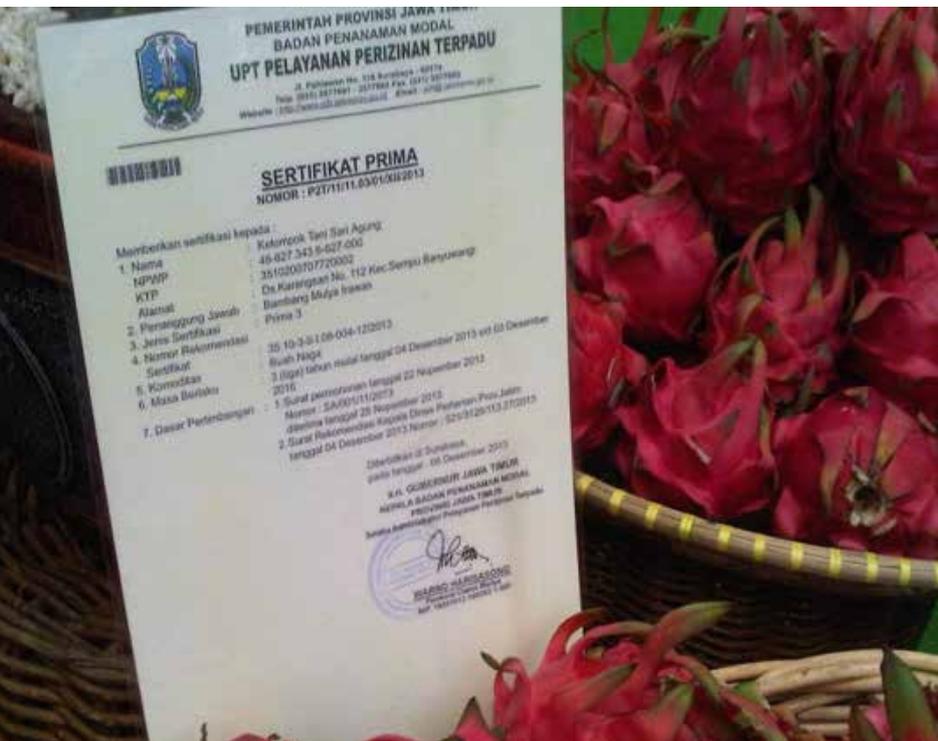
"Kita bisa bayangkan, apabila pro-

duktivitas singkong lebih dari 50 ton/ha, harga tepung mocaf bisa lebih rendah lagi," papar Agung.

Melihat peluang tersebut, Agung menantang civitas academica Universitas Jember bisa mendapatkan inovasi dan teknologi budidaya singkong yang mempunyai provitas 80 ton/ha.

Sementara itu BKP akan merumuskan kebijakan agar FPF dapat meningkatkan penggunaan komponen bahan baku lokal.

"Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak semua stakeholder untuk mulai mewujudkan gerakan melokalkan bahan baku lokal," pungkask Agung.



Kementan Lindungi Konsumen melalui Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Keamanan dan mutu pangan bukan hanya isu yang terkait dengan perdagangan saja, namun juga dengan kesehatan. Hal ini seiring tuntutan masyarakat akan pangan segar yang aman dan bermutu terus meningkat. Untuk mewujudkan pangan hal tersebut, dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah, produsen dan konsumen.

Kementerian pertanian sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan jaminan keamanan dan mutu pangan segar, telah menerbitkan antara lain Permentan No.51 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan beberapa pedoman sertifikasi.

"Untuk menjamin pangan segar aman yang beredar, kami telah menerbitkan sertifikat dan nomor pendaftaran pangan segar hasil pertanian terha-

dap berbagai jenis pangan segar," ungkap Kepala Badan Ketahanan pangan, Agung Hendriadi, dikantornya baru-baru ini.

"Sertifikasi dan pendaftaran produk ini dapat dilakukan di Instansi yang menangani pangan sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) pusat dan daerah," lanjut Agung

Nomor pendaftaran PSAT dan sertifikasi akan diberikan pada produk PSAT yang memenuhi persyaratan minimal keamanan pangan segar yang akan diedarkan.

"Penerbitan nomor pendaftaran dan sertifikasi dilakukan melalui mekanisme penilaian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi, inspeksi sarana produksi, proses produksi dan pengujian produk terkait parameter keamanan pangan," tambah Agung

Pendaftaran dan sertifikasi pangan

segar saat ini masih bersifat sukarela, namun sejak tahun 2015, jumlah produk pangan segar yang di Sertifikasi terus bertambah.

"Kami telah menerbitkan 720 sertifikat PRIMA pada tahun 2015, dan hingga kini terus meningkat mencapai 1285. Sedangkan pendaftaran PSAT, telah mencapai 2117 produk," Kata Agung

Kedepannya, menurut Agung, diharapkan para pelaku usaha terus meningkatkan kepedulian dan kesadarannya untuk melakukan sertifikasi dan pendaftaran pangan segar.

"Badan Ketahanan Pangan secara rutin juga melakukan pengawasan terhadap produk pangan segar yang beredar untuk menjamin masyarakat memperoleh produk pangan segar yang aman dan bermutu" pungkas Agung.



Kementan Sertifikasi 22 Rumah Kemas untuk dukung Ekspor

Melemahnya kurs rupiah terhadap mata uang dolar Amerika disikapi pemerintah dengan terus mendorong peningkatan ekspor produk Indonesia, untuk menurunkan angka defisit perdagangan.

Sebagai negara kaya dengan potensi buah tropis yang rasanya eksotik dan khas, komoditas ini dapat dijadikan andalan ekspor, salah satunya adalah buah manggis.

Negara tujuan ekspor utama buah ini adalah China, yang telah dibuka kembali pada Desember 2017 melalui penandatanganan Protocol of Phytosanitary Requirements for the Export of Mangosteen Fruits from Indonesia to China.

Sesuai dengan protokol ekspor tersebut, buah manggis yang akan diekspor ke China harus berasal dari rumah kemas yang tersertifikasi dan telah memenuhi persyaratan keamanan pangan, antara lain : Sanitasi dan higiene, adanya registrasi kebun manggis yang menunjukkan pemenuhan Good

Agricultural Practices (GAP) pada tingkat budidaya, Good Handling Practices (GHP), dan adanya traceability system.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan merupakan institusi yang mempunyai kewenangan dalam melakukan sertifikasi, telah melakukan upaya percepatan sertifikasi rumah kemas untuk mendorong percepatan ekspor.

"Pada sentra-sentra buah manggis telah disiapkan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah untuk dapat mensertifikasi rumah kemas tersebut," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi, di kantornya, Jum'at (25/10).

"Sentra-sentra buah manggis dan pengemasan antara lain terdapat di Propinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, DKI Jakarta, dan secara total saat ini sudah ada 22 rumah kemas tersertifikasi" lanjut Agung

Menurut Agung, dengan penerapan sistem tersebut produk yang dikeluar-

kan oleh rumah kemas, dianggap telah memenuhi aspek minimal yang dipersyaratkan dan diharapkan dapat mengurangi risiko penolakan dan notifikasi produk oleh negara tujuan ekspor.

Dengan adanya layanan pendaftaran rumah kemas, khususnya dalam percepatan ekspor buah manggis Indonesia tahun 2018, dengan estimasi tonase setiap pengiriman sebesar 4 ton, Agung optimis akan mampu mendorong ekspor senilai 36 juta USD

"Potensi ekspor ini terus meningkat, terutama saat panen raya bulan Februari tahun depan," jelas Agung.

Untuk itu, lanjut Agung, momentum kerjasama perdagangan khususnya ekspor manggis ke China harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan terus melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong ekspor manggis tersebut, dan buah eksotik lainnya seperti buah naga, mangga dan salak.

"Dengan meningkatnya ekspor yang kita lakukan, diharapkan buah-buahan tropis Indonesia bisa semakin berkembang," pungkas Agung.

BKP Kementan Dorong Ekspor Pala Melalui Penerbitan Health Certificate (HC)

Indonesia dikenal sebagai surga rempah dunia. Beranekaragam rempah-rempah dihasilkan negeri ini sejak dulu kala, sehingga tidak mengherankan jika jaman dahulu bangsa eropa berdatangan ke Indonesia demi memperoleh rempah-rempah.

Salah satu rempah yang sangat diminati adalah Pala, yang dimanfaatkan sebagai penambah citarasa makanan, juga digunakan sebagai penghangat tubuh khususnya pada daerah beriklim sub tropis.

Uni Eropa sebagai tujuan utama ekspor pala dari Indonesia dikenal sangat ketat memberlakukan standar keamanan pangan. Pada tahun 2016, EU menerapkan EU Regulation No 24/2016 yang mewajibkan adanya sertifikasi kesehatan pangan/Health Certificate (HC) bagi pala Indonesia yang diekspor ke UE, yang menjamin kontaminasi aflatoksin dan okratoksin pada pala memenuhi persyaratan EU.

Regulasi tersebut telah direspon dengan cepat oleh Badan Ketahanan Pangan selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dengan memberikan layanan penerbitan HC berdasarkan prosedur penerbitan HC sesuai tuntutan UE.

"Penerbitan HC ini dapat difasilitasi baik oleh OKKP pusat dan daerah, sesuai dengan pelabuhan keberangkatan produk Pala tersebut," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi yang ditemui belum lama ini.

"Kita menerbitkan HC dengan pros-



es yang telah ter-standard, dimulai dari tahapan penilaian sarana produksi, pengambilan sampel oleh petugas pengambil contoh terlatih serta pengujian Aflatoksin dan Okratoksin pada laboratorium akreditasi" lanjut Agung.

"Upaya ini bertujuan agar sertifikat yang diterbitkan valuable dan kredible" pungkas Agung.

"Dengan adanya layanan penerbitan HC yang dilakukan oleh OKKP, memberikan dampak luar biasa terhadap keberterimaan produk pala ekspor Indonesia di UE," ungkap Parlin Hasibuan, Manajer Pemasaran PT. East Indian Agency Product sebagai salah satu eksportir pala.

Dengan adanya proses pemerik-

saan, pengambilan contoh dan pengujian oleh OKKP, eksportir menjadi lebih confident dalam melakukan ekspor serta memperkecil resiko penolakan oleh negara tujuan. Kepercayaan diri para eksportir ini mendorong pertumbuhan ekspor pala Indonesia yang cukup signifikan.

"Penerbitan HC terus meningkat setiap tahun, tahun 2016 diterbitkan 224 HC, tahun 2017 sejumlah 419 HC, sedangkan tahun ini sampai bulan November sudah terbit 294 HC, dengan asumsi volume 2 ton pala setiap pengiriman, maka dengan penerbitan HC oleh OKKP tahun ini mendorong ekspor senilai kurang lebih 8,82 juta USD" tambah Agung Hendriadi.



Kementan Bangun Kawasan Mandiri Pangan Untuk Tingkatkan Pendapatan Masyarakat

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan pendapatan masyarakat, dan ketersediaan pangan di suatu daerah. Oleh karena itu pemerintah sangat memperhatikan masalah tersebut, terutama di pedesaan, padahal pedesaan memiliki sumberdaya cukup besar dalam menghasilkan pangan.

Untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Perta-



“Saya sudah meminta kepada para Kepala Dinas agar membangun sinergitas dan koordinasi dengan dinas lainnya. Kalau pekerjaan ini dilakukan bersama-sama, semuanya menjadi ringan dan akan cepat terlihat hasilnya.”

nian sejak tahun 2015 meluncurkan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan (KMP), untuk mendorong ketersediaan pangan dipedesaan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Komponen kegiatan KMP meliputi pemberdayaan masyarakat dalam melakukan usaha, penguatan kelembagaan ekonomi, dan integrasi dukungan lintas sektor.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, Badan Ketahanan Pangan daerah bekerjasama dengan dinas instansi terkait, koperasi, badan usaha daerah dan Corporate Social Responsibility (CSR)

“Saya sudah meminta kepada para Kepala Dinas agar membangun sinergitas dan koordinasi dengan dinas lainnya,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi menjelaskan dikantornya beberapa waktu lalu.

“Kalau pekerjaan ini dilakukan bersama-sama, semuanya menjadi ringan dan akan cepat terlihat hasilnya,” tambah Agung.

Pada tahun 2015 – 2017 KMP telah dilaksanakan di 23 provinsi, 76 ka-

bupaten, 77 kawasan/kecamatan, 388 desa, 388 kelompok; kemudian pada tahun 2018 ditambah di 20 kabupaten, 20 kawasan/desa, 40 kelompok.

Kelompok pelaksana KMP ini sangat bergairah mengusahakan berbagai komoditas sesuai potensi daerahnya masing-masing. Antara lain ada usaha budidaya jagung, pisang, sayuran, kambing, itik, dan ayam.

Salah satu kelompok yang berhasil di Kelompok Gunung Mekar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, dengan kegiatan hortikultura Bunga Gunitir yang sudah menambah pendapatan sebesar Rp. 11.000.000.

Usaha ini sangat membantu meningkatkan pendapatan kelompok. Peningkatan pendapatan yang tercatat di Lembaga Keuangan Kawasan (LKK) di masing-masing kawasan, rata-rata 15 persen per tahun secara nasional. Hasil tambahan pendapatan ini penggunaannya sesuai musyawarah kelompok. Antara lain untuk memperluas skala usaha, menambah penerima manfaat pada kelompok dan jenis usaha lain.

Dari monitoring yang dilakukan, peningkatan usaha produktif yang dilakukan kelompok diharapkan masyarakat penerima manfaat KMP akan lebih mandiri.

Untuk memperkuat model yang sudah berjalan, pada tahun 2019 KMP mengalami transformasi menjadi Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) di daerah rentan rawan pangan di 12 prov, 13 kab, 13 kawasan/desa, 13 gapoktan, 65 kelompok.

PKU bertujuan untuk (1) meningkatkan budidaya, dan pengolahan hasil dari hulu – hilir; (2) meningkatkan nilai tambah produk komoditas unggulan; (3) meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin; (4) meningkatkan pendapatan; serta (5) membentuk lembaga usaha yang berbadan hukum.

Sasaran PKU adalah lokasi stunting dan atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) prioritas 3,4,5 dan atau persentase Rumah Tangga Miskin Petani (%RTM-P) di daerah rentan rawan pangan.

Kawasan Mandiri Pangan Kementan dapat Meningkatkan Pendapatan dan Entaskan Kemiskinan

"Melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi di Kawasan Mandiri Pangan, saya yakin dapat meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya juga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi saat mengunjungi Kawasan Mandiri Pangan (KMP) di Kabupaten Gianyar, Bali, Jum'at (21/9).

Kawasan Mandiri Pangan merupakan kegiatan prioritas nasional BKP yang dilaksanakan pada daerah rentan pangan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan dan dukungan lintas sektor untuk mendorong usaha produktif budidaya pertanian.

Kegiatan KMP diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan penyediaan pangan yang mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat, terutama masyarakat miskin di lokasi sasaran.

Tahun ini, Provinsi Bali mendapat alokasi kegiatan KMP di Desa Taro, Kecamatan Tegal Lalang, Kabupaten Gianyar.

"Saya pesankan agar bantuan pemerintah dikelola dengan baik, dan menjadi modal usaha sehingga bisa menggerakkan ekonomi anggota dan memberi keuntungan. Kalau ini dijalankan dengan baik, KMP ini akan bisa berkelanjutan," pesan Agung menegaskan.

"Saya harapkan dari modal yang diberikan bisa bertambah setidaknya



menjadi dua kali lipat di akhir tahun ini," tambah Agung.

Menurut Agung, dengan adanya penambahan modal, usaha kelompok bisa diperbesar dan hamparan diperluas.

"Kalau usaha mulai maju, keuntungan yang didapat sebagian dapat dinikmati, tetapi sebagian harus digunakan kembali untuk memperluas usaha kelompok," ujar Agung mengingatkan.

Kawasan Mandiri Pangan ini akan dikembangkan menjadi Sentra Usahatani Berkelanjutan (PSUB) dengan hamparan minimal 100 ha dengan melibatkan 10 kelompok tani yang tergabung dalam gapoktan. Adapun komoditi yang diusahakan meliputi tanaman pangan, hortikultura dan ternak.

Pengembangan Sentra Usahatani Berkelanjutan (PSUB) merupakan kegiatan di hulu dan hilir secara terintegrasi pada satu atau lebih tahapan pengolahan untuk menghasilkan produk pangan dan non pangan.

Ni Made Neka, ketua kelompok tani Gunung Mekar menyampaikan, bahwa bantuan yang diberikan pemerintah di-

gunakan untuk budidaya Bunga Gumitir, cabai, dan kentang.

"Dari budidaya Bunga Gumitir sudah didapatkan keuntungan, selanjutnya dari budidaya cabai dan kentang tidak lama lagi juga akan mulai panen, sehingga pada akhir tahun modal kami akan bertambah" kata Neka.

Sementara kelompok tani yang lain, yaitu Prameswari dengan ketua kelompok Ni Made Suwartini melakukan budidaya sayuran, antara lain pokcai, sledri, dan cabai.

"Sebelum ada kegiatan KMP ibu-ibu di sini hanyalah ibu rumah tangga, tetapi sekarang kami punya kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan menekan pengeluaran rumah tangga," ujar Suwartini.

Agung yang didampingi Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Benny Rachman, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Mardiana, merasa puas melihat kinerja KMP ini.

"Tolong terus dikembangkan agar KMP ini bisa berkelanjutan," pungkas Agung.

Kepala BKP Kementan Terima Petani Muda Korea, untuk Jajaki Korporasi Petani

Kepala Badan Ketahanan (BKP) Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) menerima kunjungan dari Korea Young Farmers di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Bogor, Rabu (10/10).

Kunjungan ini bertujuan menjajaki kerjasama dalam pengembangan usahatani, terutama transfer teknologi budidaya sampai proses pengemasan produk.

Untuk melihat kondisi lapangan, perwakilan dari para petani muda Korea juga mengunjungi salah satu gabungan kelompok tani (gapoktan) di Kab Cianjur, Jawa Barat yang telah mengembangkan budidaya hortikultura.

Dari hasil kunjungan tersebut, para petani muda Korea berkeinginan untuk menjalin kerjasama dengan petani muda Indonesia utamanya dalam transfer teknologi budidaya, prosesing dan pengemasan sampai pemasaran.

"Kerjasama ini baik untuk dilakukan, karena akan mendukung keberhasilan dalam implementasi kegiatan korporasi usahatani," kata Agung.

Namun demikian, menurut Agung, perlu juga dilihat terlebih dulu di lapangan sebelum kita putuskan desain dan lokasi yang paling sesuai.

Choi Byeong Moon (Presiden Asosiasi Petani Muda mengatakan "para petani muda Korea ini, ingin mempelajari dan memperluas pengalaman dalam usahatani melalui pengembangan kerjasama dengan beberapa negara yang salah satunya adalah Indonesia," ujarnya.



Sejalan dengan tawaran kerjasama tersebut, Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2019 merencanakan akan mengembangkan kegiatan Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) di daerah Rentan Rawan Pangan.

"Kegiatan ini merupakan penyempurnaan konsep kegiatan Kawasan Mandiri Pangan (KMP), dimana kegiatan yang akan dilakukan meliputi hulu dan hilirisasi, atau dari budidaya sampai pengolahan dan pemasaran produk," ujar Agung menjelaskan.

Menurut Agung, kegiatan ini rencananya akan dikembangkan di 13 lokasi dimana setiap kabupaten satu lo-

kasi yang melibatkan 5 kelompok tani sebagai plasma dan satu gapoktan sebagai inti.

Tujuan kegiatan PKU adalah untuk memperkuat modal, meningkatkan nilai tambah usahatani serta meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah rentan rawan pangan.

Diharapkan dengan rencana kerjasama di lokasi kegiatan PKU rentan rawan pangan tersebut, dapat meningkatkan kemampuan petani muda Indonesia dalam hal pengembangan usahatani melalui program pertukaran petani untuk magang di Korea serta kegiatan capacity building lainnya.

BKP Kementan Terbitkan FSVA untuk Rekomendasi Atasi Kerawanan Pangan

Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.

Penyediaan informasi dijamin dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

Informasi tersebut yang dimaksud adalah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA). FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

"FSVA ini telah dimanfaatkan berbagai instansi untuk penentuan target intervensi program. Sedangkan BKP memanfaatkannya sebagai salah satu rujukan dalam menetapkan lokasi program seperti Program Aksi Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (KMP), dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)," kata



Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi di ruang kerjanya, Selasa (30/10).

Menurut Agung, FSVA juga digunakan untuk mengidentifikasi wilayah rentan rawan pangan oleh Bappenas, dalam memfokuskan program Scale Up Nutrition (Sun) Movement yang salah satunya fokus pada Gerakan 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals).

Kementerian Desa juga menggunakan FSVA sebagai dasar dalam Penanganan Daerah Rawan Pangan - Penanganan Daerah Tertinggal (PDRT-PDT).

Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional memakai FSVA dalam menentukan lokasi Program Gizi Anak Sekolah.

Lembaga internasional seperti World Food Programme (WFP) memanfaatkan FSVA dalam menentukan lokasi

intervensi di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua serta penentuan lokasi survey biaya pangan.

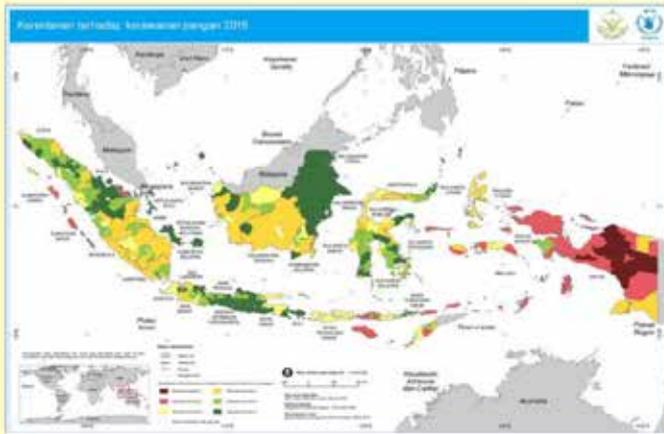
Di tingkat daerah, sebagian pemerintah daerah telah menjadikan hasil rekomendasi FSVA sebagai acuan penyusunan kebijakan/program ketahanan pangan.

Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota.

FSVA 2018 adalah pemutakhiran dari edisi-edisi sebelumnya. Pemutakh-

335 KABUPATEN TAHAN PANGAN SELAMA PERIODE 2015-2018



KAB. RENTAN PANGAN



KAB. TAHAN PANGAN



- Kabupaten Rentan Pangan yang Naik Peringkat Sebanyak 75 Kabupaten (19%)
- Kabupaten Tahan Pangan yang Naik Peringkat Sebanyak 102 Kabupaten (26%)

#capaianKINERJA4TAHUNBKP



BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



BKPKEMANTAN



@BKPKemantan



badanketahananpangan



BKP Kementan

iran yang dilakukan meliputi metode analisis, indikator, dan data yang digunakan. Selain itu FSVA 2018 mengakomodasi perkembangan wilayah kabupaten/kota hasil pemekaran wilayah.

Hasil sementara FSVA 2018 menunjukkan sebanyak 81 kabupaten termasuk dalam katagori rentan terhadap rawan pangan yang terbagi atas 26 kabupaten (6,3%) prioritas 1, 21 kabupaten (5%)

prioritas 2 dan 34 kabupaten (8,2%) Prioritas 3. Indikator utama pada wilayah yang rentan tersebut adalah: (i) tingginya rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan; (ii) tingginya balita stunting, dan (iii) tingginya penduduk miskin.

"Hasil analisis FSVA dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk intervensi program peningkat-

an ketahanan pangan dengan melihat indikator utama yang dapat menjadi pemicu terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan," tutur Agung.

"Melalui FSVA pemerintah daerah dapat melakukan intervensi dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya pangan yang ada di wilayah, sehingga masyarakat akan tahan pangan," pungkas Agung.



e-commerce TTI :

Menjawab Tantangan Era Digital Distribusi Pangan

Pengendalian harga pangan masih menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah dalam pembangunan ekonomi pertanian saat ini. Berbagai hal penyebab terjadinya fluktuasi harga dan pasokan pangan seperti: ketidakseimbangan supply-demand, terhambatnya saluran distribusi pangan, hingga adanya penimbunan/penahanan bahan pangan yang ditemukan aparat penegak hukum.

Belum lagi panjangnya rantai pasok dari produsen hingga konsumen menambah deretan permasalahan tentang distribusi pangan.

"Secara umum tata niaga pangan di Indonesia ini sangat panjang," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi di ruang kerjanya, Kamis (25/10).

Panjangnya pelaku tata niaga pangan menurut Agung, membuat konsumen harus menerima harga akumulasi dari margin keuntungan yang diperoleh dari pelaku rantai pasok.

"Melihat permasalahan tersebut,

sejak tahun 2016 hingga kini kami kembangkan Toko Tani Indonesia (TTI) untuk mengendalikan pasokan dan harga pangan," tegas Agung.

Kegiatan ini bertujuan (1) mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan; (2) menyerap produk pertanian nasional khususnya bahan pangan pokok dan strategis; dan (3) memberikan kemudahan akses dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis, singkatnya petani disisi produsen memperoleh perlindungan dengan adanya jaminan pasar dan disisi konsumen mendapat kemudahan aksesibilitas pangan dengan harga yang terjangkau.

Secara operasional kegiatan ini melibatkan produk petani yang dibeli oleh Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) dengan harga yang wajar, kemudian disortasi, dikemas, dan distribusi langsung menjadi beras segar ke pedagang TTI yang berlokasi di pasar atau daerah konsumen utamanya yang menjadi barometer fluktuasi harga dan pasokan

komoditas pangan pokok dan strategis dengan harga dibawah harga eceran tertinggi/harga pasar.

"Jadi, petani yang tergabung dalam Gapoktan diajak menjalankan usaha perberasan dengan pola korporasi petani, sehingga petani selain berbudi daya padi juga menjalankan manajemen korporasi ala petani melalui Gapoktan," jelas Agung.

Dijelaskan Agung, strategi yang dilakukan adalah mengendalikan pasokan menjadi 3-4 pelaku yaitu petani, gapoktan, TTI, dan konsumen.

Model bisnis TTI yang tersebar di 31 provinsi saat ini masih fokus pada komoditas beras, cabai merah, dan bawang merah yang kedepannya dapat berkembang menjadi bahan pangan lainnya.

"Beras menjadi alasan utama untuk dipasarkan, karena setiap hari hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia mengkonsumsi pangan pokok ini," tambah Agung.

Secara umum kegiatan TTI

mendapat sambutan hangat dari masyarakat, terutama dari kalangan menengah kebawah karena beras yang dijual ke konsumen relatif terjangkau dan berkualitas yaitu di kisaran Rp 8.500-8.800/kg di seluruh Indonesia.

Dari kegiatan TTI ini telah melibatkan 1.399 Gapoktan sebagai pemasok bahan pangan, yang didalamnya terlibat 125.910 petani dan 3.655 TTI sebagai outlet dalam memasarkan produk petani.

e-commerce TTI

Guna menjawab tantangan di era digital dan perdagangan e-commerce, dan memudahkan aksesibilitas masyarakat terutama perkotaan di wilayah Jabodetabek dalam memperoleh pangan hingga di tempat, pada awal tahun 2018 telah dikembangkan aplikasi e-commerce TTI.

Tujuan pengembangan aplikasi e-commerce adalah efisiensi pengelolaan distribusi beras, meningkatkan kapasitas kontinuitas pasokan pangan melalui TTI, memudahkan pembangunan data base (pola panen & pola konsumsi) dan ke depan akan dikembangkan lebih luas dengan melibatkan



langsung masyarakat sebagai konsumen akhir.

Dibandingkan dengan transaksi konvensional, transaksi e-commerce memberikan beberapa kemudahan dilihat dari proses pemesanan lebih cepat, pasokan beras lebih terjamin, validitas data lebih akurat serta terinformasinya lokasi TTI yang dapat diakses masyarakat.

Melalui layanan online berbasis ap-

likasi ini, TTI sebagai outlet dapat memesan beras segar langsung kepada Gapoktan. Meskipun belum sampai setahun, antusias Gapoktan dan TTI di Jabodetabek untuk menggunakan e-commerce TTI cukup pesat, tercatat sebanyak 291 Gapoktan dan 1.140 TTI ikut dalam e-commerce, dengan transaksi penjualan beras segar mencapai Rp 7,23 Milyar.

Sebagai layanan perdagangan berbasis online, sistem e-commerce TTI setidaknya berisikan tentang berbagai hal kegiatan TTI mulai dari informasi lokasi gapoktan pemasok dan TTI di Jabodetabek, transaksi Gapoktan kepada TTI, transaksi harga di tingkat TTI, dan lain sebagainya, bahkan kedepan informasi tersebut bisa dijadikan business market intelligent.

Pada akhirnya, terobosan pemerintah melalui kegiatan TTI secara e-commerce ini merupakan salah satu instrumen pokok dari kebijakan stabilisasi harga pangan nasional yang saling berkolaborasi dengan kegiatan stabilisasi harga pangan lainnya, yang dalam jangka panjang menjadi solusi permanen dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.



Produksi Pertanian Setiap Tahun Meningkatkan



"Melalui berbagai kegiatan yang kami lakukan, data menunjukkan tiap tahun produksi pertanian meningkat, sehingga pangan kita cukup terutama beras," ujar Kepala Badan Ketahanan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi dalam Rountable Ketahanan pangan Nasional tahun 2019 di Menara Kadin Indonesia, Senin (24/9).

Dalam acara yang penyelenggaraannya bertepatan dengan Hari Tani Indonesia ini, Agung tampil mewakili Menteri Pertanian.

Dalam paparannya Agung menjelaskan beberapa produksi pertanian meningkat, ekspor pangan juga meningkat.

Selain itu, menurut Agung, Kementan juga sedang mengembangkan potensi pangan lokal yang berlimpah. Di antaranya mengembangkan tepung

lokal, terutama dari sagu.

"Untuk mewujudkan ketahanan pangan, saat ini kami sedang memproses kebijakan penggunaan tepung lokal sebesar 10%. Jadi setiap impor terigu harus dicampur tepung local 10%," jelas Agung.

Dalam kesempatan ini, Agung juga menagih janji hasil MOU di Bali baru-baru ini untuk direalisasikan kegiatannya.

Dalam sambutannya, Ketua KADIN, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan luas Indonesia hanya 1/3 yang berupa daratan, dan 30% diantaranya bisa digunakan untuk pangan.

"Secara umum lahan untuk keperluan pangan sebenarnya tidak besar. Untuk itu kita harus dapat memanfaatkannya seoptimal mungkin," ujar Rosan.

Kepala BULOG, Budi Waseso mengatakan, dalam mewujudkan Ketahanan Pangan hingga kedaulatan pangan, sangat penting adanya sinergi

dengan semua stakeholder.

"BULOG tidak bisa berjalan sendiri, atau pertanian berjalan sendiri, ujar Budi Waseso.

"Dalam koordinasi juga diperlukan sikap untuk memajukan bangsa dan negara. Jangan menguatkan ego sektoral, sehingga koordinasi dapat merumuskan untuk memajukan bangsa," tegasnya.

Melalui pertemuan ini, diharapkan menghasilkan rumusan untuk menjadikan Indonesia berkedaulatan pangan, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat.

Acara ini selain dihadiri Kepala BKP Kementan, Ketua Kadin, Direktur Utama BULOG dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan – Kemendag, juga para pakar, media, asosiasi dan organisasi yang mempunyai kepedulian dan berkompeten dengan ketahanan pangan.



BKP Kementan Tingkatkan Kompetensi SDM untuk Dukong Ekspor

Kementerian Pertanian terus berupaya menggenjot ekspor hasil pertanian. Sebagai negara agraris yang kaya akan hasil pertanian sudah sewajarnya Indonesia menjadi produsen utama pangan dunia yang pantas diperhitungkan.

Upaya untuk mendorong ekspor, salah satunya dilakukan dengan peningkatan kompetensi SDM Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dalam melaksanakan pendampingan penerapan manajemen sistem mutu oleh pelaku usaha, verifikasi dan pengawasan penerbitan Health Certificate dan registrasi rumah kemas.

"Jumlah PMHP saat ini tidak lebih dari 500 orang, dengan sebaran yang belum merata, kita akan buat rencana pengembangan pejabat fungsional ini dengan memanfaatkan adanya inpass-

ing sampai tahun 2021 menjadi 1500," Kata Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada acara pembukaan workshop Fungsional PMHP di Bogor, Selasa (31/10).

"Tantangan dan isu keamanan dan mutu pangan segar hasil pertanian semakin meningkat, para petugas selain jumlah perlu terus ditingkatkan kompetensinya, ini merupakan bukti komitmen BKP sebagai pembina teknis PMHP," urai Agung.

Walaupun jumlah PMHP belum ideal sebagaimana disinggung Agung, namun kinerja PMHP ini cukup membanggakan, diantaranya dalam pengembangan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKPP) baik di tingkat Pusat maupun daerah dan pengawasan keamanan dan

mutu pangan segar, khususnya dalam melakukan inspeksi ketika ada kasus keamanan pangan segar.

Pada workshop kali ini pejabat PMHP diberikan pembekalan substansi terkait dengan ekspor hasil pertanian, penguatan pembinaan teknis, inspeksi dan pengawasan, serta penguatan pengujian. Selain itu juga disampaikan sosialisasi usulan kenaikan kepengkatan secara online bagi pejabat fungsional PMHP.

Lebih lanjut Agung berpesan agar PMHP mampu memanfaatkan secara maksimal workshop PMHP untuk berbagi ilmu, pengalaman dan mencari solusi dari berbagai kendala di lapangan.

"PMHP harus berkiprah, tunjukkan jati diri dan bekerja secara profesional," pesan Agung.

8.814 KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) MENDUKUNG PENGENTASAAN DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan gizi.

JUMLAH KELOMPOK KRPL TAHUN 2015 - 2019



Tahun 2018 -> 556 KRPL
mendukung penanganan stunting
dari 1000 desa stunting



PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA DAN MASYARAKAT

- Mengurangi pengeluaran pangan Rp 750 ribu s.d Rp. 1,5 juta/bulan



MENGURANGI JEJAK KARBON DAN EMISI

- Penurunan Emisi Karbon 29% 2030



DIVERSIFIKASI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

- Peningkatan Konsumsi B2SA
- Skor PPH meningkat dari 85,2 (2015) -> 90,4 (2017) -> 100



KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN DAN GIZI KELUARGA



KONSERVASI SUMBER DAYA GENETIK LOKAL

- > 300 komoditas

#capaianKINERJA4tahunBKP



BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



BKPKEMANTAN



@BKPKemantan



badanketahananpangan



BKP Kemantan

408 KAWASAN MANDIRI PANGAN (KMP) MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT PEDESAAN



KMP berhasil meningkatkan permodalan kelompok rata-rata **15%** ↑

JUMLAH KELOMPOK KMP TAHUN 2015-2018*)



*) KMP dari tahun 2015-2018 telah dilaksanakan di 25 provinsi, 96 kabupaten, 97 kecamatan, 408 desa, dan 428 kelompok

KEGIATAN USAHA KELOMPOK KMP TAHUN 2015-2018 (%)



KMP (Kawasan Mandiri Pangan) merupakan kawasan yang dibangun bagi masyarakat di daerah rentan terhadap rawan pangan dalam rangka pemberdayaan ketahanan pangan untuk menjadi lebih mandiri.



#capaianKINERJA4TAHUNBKP



BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



BKPKEMANTAN



@BKPKementan



badanketahananpangan



BKP Kementan